

Merdeka Belajar di Tengah Ketimpangan: Tantangan dan Harapan bagi Pendidikan Indonesia

**Diva Nazira Aulia¹, Annatasya Dwi Fadilah², Figlia Muthmainnah Syakura³,
Muhammad Akmal Adiasta⁴, Nurdin⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia

e-mail: divanaziraaulia@upi.edu¹, annatasyadwifadilah@upi.edu², figliasykr18@upi.edu³,
akmaladiasta1@upi.edu⁴, nurdin_adpen@upi.edu⁵

Abstrak

Merdeka Belajar bertujuan memberikan kebebasan bagi siswa dan guru dalam belajar dan mengajar. Berlandaskan semangat Ki Hajar Dewantara, program ini mengutamakan pembelajaran berbasis proyek, materi esensial, dan fleksibilitas guru, dengan penerapan melalui tiga jalur: Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0. Namun, ketimpangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menjadi hambatan besar. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi guru, minimnya fasilitas digital, dan distribusi guru yang tidak merata menghambat pelaksanaan program. Meski menghadapi berbagai tantangan, Merdeka Belajar membawa harapan besar dalam mengatasi disparitas pendidikan melalui pelatihan guru, penyediaan sarana digital, dan dukungan untuk sekolah di daerah terpencil. Dengan kolaborasi dari semua pihak, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Kata kunci: *Merdeka Belajar, Pendidikan, Ketimpangan*

Abstract

Merdeka Belajar aims to provide freedom for students and teachers in learning and teaching. Rooted in the spirit of Ki Hajar Dewantara, this program emphasizes project-based learning, essential materials, and teacher flexibility, implemented through three pathways: Mandiri Belajar (Independent Learning), Mandiri Berubah (Independent Transition), and Mandiri Berbagi (Independent Sharing). This policy is designed to create inclusive, adaptive, and relevant education aligned with the demands of the Industrial Revolution 4.0 era. However, educational disparities in Indonesia, particularly in 3T areas (frontier, outermost, and disadvantaged regions), pose significant challenges. Limited infrastructure, low teacher competence, inadequate digital facilities, and unequal teacher distribution hinder the program's implementation. Despite these challenges, Merdeka Belajar offers great hope for addressing educational disparities through teacher training, the provision of digital resources, and support for schools in remote areas. With collaboration from all stakeholders, this initiative is expected to create a more equitable, high-quality education system capable of meeting future challenges.

Keywords : *Merdeka Belajar, Education, Inequality*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam membangun masa depan bangsa. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan, sistem pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun, ketimpangan pendidikan di Indonesia, baik dari segi akses, kualitas, maupun fasilitas, masih menjadi persoalan yang kompleks. Daerah-daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya dukungan teknologi dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus mengembangkan kebijakan inovatif yang bertujuan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Salah satu kebijakan strategis yang diluncurkan adalah Merdeka Belajar, sebuah inisiatif yang dirancang untuk merevolusi sistem pendidikan di Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia meluncurkan inisiatif Merdeka Belajar, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bagaimana mereka belajar. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif, yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa terikat pada kurikulum yang ketat (Nurhakim, 2023).

Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa dalam berpikir dan berekspresi. Konsep ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kebebasan dalam pendidikan. Dengan menerapkan kurikulum baru ini, diharapkan siswa dapat mendalami konsep dan memperkuat kompetensi mereka. Program ini juga berusaha menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 dengan memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan.

Kurikulum Merdeka Belajar memiliki beberapa ciri utama:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek : Fokus pada pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
2. Materi Esensial : Pembelajaran lebih mendalam pada materi yang esensial, memberikan waktu bagi siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh.
3. Fleksibilitas Guru : Guru diberikan keleluasaan untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Implementasi Merdeka Belajar dilakukan melalui tiga jalur:

1. Mandiri Belajar : Kebebasan bagi satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum tanpa mengganti kurikulum yang ada.
2. Mandiri Berubah : Penerapan ketentuan merdeka dengan menggunakan perangkat terbuka yang disediakan.
3. Mandiri Berbagi : Sekolah dapat mengembangkan perangkat ajar sendiri dalam penerapan kurikulum (Fadhol, 2023)

Relevansi Merdeka Belajar dengan ketimpangan pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Kebijakan ini berupaya mengatasi disparitas kualitas pendidikan yang ada, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil melalui hibah dan pelatihan guru, Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk mempercepat akses dan meningkatkan pengalaman belajar siswa.

Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti infrastruktur yang kurang memadai dan pemahaman yang terbatas di kalangan guru, Merdeka Belajar diharapkan dapat

menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di seluruh Indonesia (Lembong, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. metode pengumpulan data melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen, dan laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi teoretis dan empiris guna mendukung pemahaman serta penyelesaian masalah. Penelitian ini memberikan landasan teoretis, membantu mengidentifikasi kesenjangan literatur, dan mengembangkan solusi berbasis data yang tersedia. Dengan memanfaatkan sumber yang kredibel dan relevan, penelitian kepustakaan menjadi langkah efisien untuk memahami permasalahan secara mendalam dan menyusun rekomendasi yang valid (Sari & Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, di mana akses, kualitas, dan kesempatan belajar tidak merata, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, ekonomi lemah, atau kelompok minoritas. Pendidikan merupakan investasi penting bagi keluarga, terutama di negara maju. Di Tiongkok, misalnya, banyak orang tua rela membeli rumah mahal di kawasan perkotaan demi memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya pendidikan sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Stigma bahwa sekolah di kota lebih baik juga mendorong banyak keluarga pindah ke perkotaan demi masa depan anak-anak mereka. Di Indonesia, ketimpangan pendidikan juga menjadi masalah yang nyata. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas lebih memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas dibandingkan dengan sekolah di pedesaan atau wilayah terpencil. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan. Di beberapa daerah, seperti Wonosobo di Jawa Tengah, angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat perekonomian masyarakat lemah semakin memperparah kesenjangan pendidikan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi (Anwar, 2022).

Ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan akses antara perkotaan dan pedesaan, tetapi juga oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini berdampak langsung pada proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti kelas yang bocor, meja dan bangku rusak, atau fasilitas olahraga yang minim, seringkali disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola fasilitas, serta rendahnya kesadaran guru dan siswa dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan peningkatan akses, tetapi juga perbaikan manajemen dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Hal ini semakin mempertegas urgensi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Nurharirah & Effane, 2022).

Masalah kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait dengan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan faktor sumber daya manusia, khususnya guru. Beberapa tantangan yang dihadapi

meliputi kualitas guru yang masih rendah, terutama di daerah terpencil, di mana banyak guru belum memiliki ijazah sarjana. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang dihasilkan. Bahkan di perkotaan, meskipun banyak guru sudah sarjana, sering kali mereka berasal dari disiplin ilmu yang tidak relevan dengan bidang yang diajarkan, sehingga membutuhkan peningkatan profesionalisme. Distribusi guru yang tidak merata juga menjadi masalah besar, dengan daerah terpencil sering kekurangan guru akibat minimnya fasilitas, keamanan, dan insentif yang memadai. Selain itu, kesejahteraan guru yang rendah, terutama bagi guru honorer, memaksa banyak dari mereka mencari penghasilan tambahan, yang akhirnya mengurangi fokus pada tugas utama mereka sebagai pendidik. Kondisi ini memperjelas bahwa perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya membutuhkan pemerataan sarana, tetapi juga peningkatan kualitas, distribusi, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah (Hasyim & Ari, 2023).

Implementasi Kurikulum Merdeka yang bertujuan memberikan fleksibilitas dan mendorong pembelajaran berbasis proyek, juga menghadapi tantangan besar di lapangan. Kurikulum Merdeka menuntut kreativitas dan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Namun, kualitas guru yang masih rendah, terutama di daerah terpencil, serta distribusi guru yang tidak merata, menjadi hambatan utama. Guru di daerah terpencil sering kali kesulitan menerapkan pendekatan Kurikulum Merdeka karena kurangnya pelatihan, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan akses terhadap jaringan internet, yang penting untuk mencari sumber belajar dan berkolaborasi. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer, juga memengaruhi fokus dan motivasi mereka dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka secara optimal. Kurangnya sarana digital di banyak sekolah pedesaan membuat implementasi pembelajaran berbasis teknologi, yang menjadi bagian dari pendekatan Kurikulum Merdeka, sulit dilakukan. Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka membutuhkan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pemerataan akses internet, serta dukungan fasilitas digital yang memadai. Dengan langkah ini, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi siswa (Nisa, Yoenanto, & Nawangsari, 2023).

Tantangan Implementasi

Implementasi Merdeka Belajar di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama ketika dihadapkan pada ketimpangan yang ada di berbagai aspek pendidikan. Ketimpangan ini mencakup perbedaan dalam hal kualitas pendidikan, kekurangan sumber daya pendidik dalam memahami merdeka belajar, terhambatnya infrastruktur dan kesenjangan teknologi, dan budaya pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung konsep pembelajaran berbasis proyek.

Tantangan dan tanggung jawab itu tentunya perlu direspon secara kritis dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan khusus pihak satuan pendidikan, apabila menginginkan tujuan ideal penerapan kurikulum merdeka tercapai. Dalam kaitannya dengan hal itu, setidaknya terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan efisien. (M.Pd., 2025).

Tantangan Implementasi Dalam Merdeka Belajar : 1. Kesiapan Guru dan Sumber Daya Manusia salah satu tantangan terbesar dalam implementasi K-13 adalah kesiapan guru. Kurikulum ini menuntut guru untuk memiliki keterampilan pedagogis yang lebih tinggi, terutama dalam menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Namun, banyak guru yang masih kesulitan beradaptasi dengan pendekatan baru ini. Beberapa di antaranya kurang familiar dengan

teknologi digital yang menjadi kebutuhan penting di era ini. Pelatihan dan pengembangan profesional guru sering kali belum merata, sehingga terjadi kesenjangan dalam penerapan K-13 (Hastini, 2024). Pengalaman personal para guru terkait kemerdekaan belajar masih minim. Menurut Shintia Revina, peneliti dari SMERU Research Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, menyebutkan telah banyak program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa program di antaranya seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Kelompok Kerja Guru (KKG) (edukasi, 2022) Menurut Revina, alasan guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan (edukasi, 2022)

Dengan memberi kebebasan lebih kepada satuan pendidikan, diharapkan kualitas pembelajaran meningkat dan pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, dengan perkembangan teknologi digital yang cepat, implementasi Merdeka Belajar menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Salah satu tantangan terbesar dalam Merdeka Belajar adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai dan perangkat teknologi yang cukup, sehingga terjadi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, banyak guru belum siap menggunakan teknologi karena kurangnya kompetensi dalam bidang ini (unknown, 2024). Di sisi lain, era digital juga membawa peluang besar bagi pendidikan. Teknologi digital memungkinkan model pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal, di mana siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform online. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Peluang lain yang muncul adalah inovasi dalam dunia pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran, platform pembelajaran online, dan konten digital edukatif (unknown, 2024). Banyak guru belum sepenuhnya memanfaatkan alat-alat digital seperti platform pembelajaran online, perangkat lunak pendidikan, atau alat-alat interaktif lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan teknologi yang tepat guna. Kendala lain yang signifikan adalah rendahnya penguasaan IT di kalangan guru. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan perangkat teknologi yang lebih kompleks, seperti mengelola platform pembelajaran daring atau melakukan asesmen digital. Guru yang memiliki pengalaman terbatas dengan teknologi digital sering kali membutuhkan bantuan eksternal atau pelatihan tambahan untuk menjalankan aplikasi pembelajaran (Farid, Putri, Rahmah, Putra, & Nisa, 2024, hal. 563).

Tantangan berikutnya adalah dalam sistem penilaian. Sistem penilaian konvensional mungkin tidak relevan lagi dengan model pembelajaran yang lebih fleksibel. Diperlukan sistem penilaian yang lebih holistik untuk mengukur berbagai kompetensi siswa, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, guru harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan digital yang cepat. Guru perlu memiliki kompetensi digital yang cukup agar bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan merancang pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. (unknown, 2024)

Model pembelajaran berbasis proyek dapat memperkuat pendekatan ilmiah (scientific method), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran). Model pembelajaran berbasis proyek juga dapat membiasakan peserta didik dalam menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok. Maka pembelajaran yang menghasilkan karya

berbasis pemecahan masalah (Project Based Learning) perlu diterapkan. Implementasi program belajar berbasis proyek (Project-Based Learning/PBL) menghadapi tantangan budaya yang signifikan di Indonesia, terutama terkait dengan kebiasaan dan nilai-nilai dalam sistem pendidikan yang lebih tradisional. Beberapa tantangan budaya yang muncul dalam penerapan PBL antara lain: Di Indonesia, sistem pendidikan secara tradisional lebih berfokus pada hasil ujian dan pencapaian nilai akademik. Pembelajaran cenderung terpusat pada penyelesaian materi secara cepat untuk mempersiapkan ujian, yang mengutamakan hafalan dan penguasaan teori. Project-Based Learning, yang menekankan pada proses, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman, bertentangan dengan budaya ini. Siswa dan guru mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan pendekatan yang tidak langsung menghasilkan nilai ujian yang cepat terlihat. Hal ini bisa mengurangi penerimaan terhadap PBL dari siswa, guru, dan orang tua yang masih terikat pada nilai ujian sebagai tolok ukur keberhasilan. Project-Based Learning mendorong kerja tim dan kolaborasi antar siswa. Namun, dalam budaya pendidikan yang lebih berfokus pada pencapaian individu, siswa mungkin kurang terbiasa dengan kerja kelompok yang intensif. Budaya "kompetisi" yang tinggi, terutama dalam ujian dan peringkat, dapat menyebabkan siswa merasa kurang nyaman bekerja sama atau berbagi tugas dalam proyek kelompok. Siswa yang terbiasa dengan pembelajaran individualistis atau persaingan dalam ujian mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan pendekatan kolaboratif yang menuntut mereka untuk berbagi ide, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara tim. Ketidaksiapan ini bisa membuat pelaksanaan PBL menjadi kurang efektif.

Harapan dan Solusi Kesiapan Guru dan Sumber Daya Manusia

Harapan: Harapan utama dalam konteks kesiapan guru adalah peningkatan kompetensi pedagogis yang mampu mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Di era pendidikan yang terus berkembang, guru diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis untuk mengelola pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Dengan peningkatan kemampuan ini, diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif bagi siswa (Kusumawati, 2023).

Solusi: Solusi untuk tantangan ini meliputi pengembangan program pelatihan profesional yang holistik dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknologi informasi, metodologi pengajaran yang inovatif, serta pengembangan keterampilan interpersonal. Kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya sangat penting untuk menciptakan program pelatihan yang terintegrasi dan merata di seluruh Indonesia (Sari, 2023).

Kesenjangan Digital

Harapan: Diharapkan bahwa dengan upaya yang tepat, kesenjangan digital di Indonesia dapat diatasi sehingga setiap siswa, di manapun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber pembelajaran digital. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam pendidikan yang relevan dan berkualitas di era digital (Pramudito, 2023).

Solusi: Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital di daerah terpencil serta menyediakan akses internet yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi guru dan siswa tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat penting. Program subsidi perangkat teknologi untuk siswa di daerah kurang beruntung akan sangat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Dewi, 2023).

Sistem Penilaian yang Relevan

Harapan: Harapan terkait sistem penilaian adalah terciptanya sistem yang lebih holistik, yang tidak hanya mengevaluasi hasil belajar berdasarkan nilai akademik, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti kreativitas, kerja sama, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan sistem penilaian yang komprehensif, siswa diharapkan dapat belajar dengan lebih baik dan termotivasi untuk berinovasi (Mardiana, 2023).

Solusi: Pengembangan model penilaian alternatif yang berbasis pada proyek dan penilaian formatif perlu menjadi prioritas. Integrasi teknologi dalam sistem penilaian akan memudahkan pengumpulan dan analisis data serta memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan transparan. Pelatihan untuk guru dalam menyusun dan menerapkan sistem penilaian baru juga harus dilakukan (Ningsih, 2023).

Budaya Pembelajaran Berbasis Proyek

Harapan: Harapan dalam penerapan Project-Based Learning (PBL) adalah terwujudnya budaya pendidikan yang lebih kolaboratif dan inovatif. Dengan menerapkan PBL, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan problem-solving yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja (Surya, 2023)

Solusi: Untuk mendorong penerapan PBL, diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada guru dan siswa mengenai filosofi dan praktik PBL. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar siswa. Mengintegrasikan PBL secara bertahap ke dalam kurikulum akan memudahkan transisi dari pembelajaran tradisional ke model pembelajaran yang lebih kolaboratif. (Hidayati, 2023)

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan tentang ketimpangan pendidikan dan tantangan dalam implementasi Merdeka Belajar menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan, baik dari segi akses, kualitas, dan kesempatan belajar, masih menjadi masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Perbedaan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana di daerah terpencil, memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kompetensi guru, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, dan kesulitan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka yang membutuhkan keterampilan pedagogis dan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang diharapkan meliputi peningkatan pelatihan profesional bagi guru, pemerataan akses teknologi dan internet, serta pembaruan sistem penilaian yang lebih holistik. Penerapan Project-Based Learning (PBL) juga diharapkan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang lebih kolaboratif dan inovatif, yang berfokus pada keterampilan praktis dan sosial yang diperlukan dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad Saiful. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Dewi, R. (2023). Digital Divide in Education: Challenges and Solutions in Indonesia. *Journal of Education Technology*, 15(2), 102-112.
- edukasi. (2022, Februari 10). 5 Kendala Guru Dalam Menghadapi Program Merdeka Belajar. Dipetik Januari 1, 2025, dari Kejar Cita Web Site: <https://www.blog.kejarcita.id>

- Fadhol. (2023, April 23). Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)? <https://Sevima.Com/>.
- Farid, M., Putri, M., Rahmah, R., Putra, M. J., & Nisa, M. (2024). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka di. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 563.
- Hastini, J. S. (2024, Oktober 1). Implementasi Kurikulum 2013: Tantangan dan Solusi di Era Digital. Dipetik Januari 1, 2025, dari Kompasiana Web Site: <https://www.kompasiana.com>
- Hasyim, K. H., & Ari, A. S. Y. (2023). *Jurnal Hikmah*. 12, 165–173.
- Hidayati, S. (2023). Implementing Project-Based Learning in Indonesia Classrooms: Opportunities and Challenges. *journal of Teaching and Learnig*, 12(3), 45-58.
- Kusumawati, L. (2023). Enhancing Teacher Competence in the Era of Merdeka Belajar: A Critical Review. *Journal of Education Studies*, 11(1), 75-90.
- Lembong, J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka*, 9.
- M.Pd., M. (2025, Januari 1). Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka . Dipetik Januari 1, 2025, Dari Kspstendik Web Site: <https://www.kspstendik.kemendikbud.go.id>
- Mardiana, T. (2023). Holistic Assessment in Education: A Necessity for Modern Learning. *Journal of Curriculum and Assessment* , 9(4), 230-245.
- Ningsih, F. (2023). Alternative Assessment Models for 21st Century Education. *International Journal of Educational Research*, 18(1), 89-101.
- Nisa, Syasya Khoirin, Yoenanto, Nono Hery, & Nawangsari, Nur Ainy Fardana. (2023). Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 287–298.
- Nurhakim, A. (2023, June 19). Pengertian Merdeka Belajar, Tujuan, Konsep, dan Komponennya. <https://Www.Quipper.Com/>.
- Nurharirah, Siti, & Effane, Anne. (2022). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(2), h. 220.
- Pramudito, A. (2023). Bridging the Digital Divide in Indonesian Education: Strategies and Initiatives. *Journal of Digital Education*, 10(1) 15-29.
- Sari, D. (2023). Professional Development for Teachers in Indonesia: Challenges and Pathways. *Journal of Teacher Education*, 14(2), 99-114.
- Sari, Milya, & Asmendri, Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Surya, M. (2023). Fostering Innovation through Project-Based Learning. *Journal of Innovative Education*, 7(2), 63-78.
- unknown. (2024, Agustus 24). Kesenjangan Digital dan Merdeka Belajar, Teknologi Bentuk Masa Depan Pendidikan Indonesia. Dipetik Januari 1, 2025, dari Pikiran Rakyat Web Site: <https://www.pikiran-rakyat.com>

